IVIAITVES Kemaritiman dan Investasi















Diterbitkan oleh: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. **Penanggung Jawab:** Plh. Sekretaris Kemenko Marves Odo R.M Manuhutu. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi Andreas Dipi Patria. **Redaktur Majalah:** Koordinator Humas Khairul Hidayati, Sub-Koordinator Humas Yanelis Prasenja, Arsiparis Ahli Muda Sugihyanto. **Jurnalis:** Murti Ali Lingga, Muchlisa Choiriah, Nelly Hassani Rachmi, Farah Almira, Fairuz Akbar, Anwar Sarifuddin. **Fotografer:** Meidika Sri Wardiana, Mirda Fiana, Ayyara Octavyanni, Ega Mahardika. **Desain Grafis:** Bella Rahmah, Dinta Audi, Rizal Arief.

DAFTAR ISI

O5 Salam Marves
Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dan
Hari Maritim Nasional ke 59

Kilas Balik 06

Dokumentasi kegiatan Kemenko Marves selama bulan Juli - September 2023

Berita Utama
Kemaritiman Indonesia Sebagai Poros
Maritim Dunia menjadi Warisan Penting untuk
dinikmati Generasi Penerus Indonesia

Berita Utama - ASEAN

Kemenko Marves Terus Gaungkan Kerja Sama

antara Pemerintah dan Dunia Usaha untuk

tetap Tingkatkan Potensi ASEAN

Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Investasi

Percepat Dekarbonisasi di Indonesia

Pemerintah Dorong Penerapan Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

Deputi Bidang Koordinasi 8 Sumber Daya Maritim

MSPS 2023, Wujudkan Kedaulatan dan Kejayaan Maritim Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi
Infrastruktur dan Transportasi
Jadi Tuan Rumah,
Kemenko Marves Sukses Gelar ISF 2023

Deputi Bidang Koordinasi
Penglolaan Lingkungan dan Kehutanan
Pengelolaan Lingkungan Untuk
Pembangunan Berkelanjutan

Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenko Marves Adakan Rakornas
Percepatan Pengembangan 5 DPSP

Semester I Tahun 2023

Deputi Bidang Koordinasi 38 Investasi dan Pertambangan

Hilirisasi, Proses Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Serta Dorong Pengembangan Rantai Nilai Industri Bernilai Tambah Tinggi

42 Staf Ahli Menteri
Festival Negeri 1000 Ombak Sail Teluk
Cenderawasih Sukses Digelar
di Kabupaten Sarmi

Rangkaian Kegiatan Kemenko Marves

Menuju Perayaan Puncak Hari Maritim

Nasional ke-59

Resensi Film
Petualangan Sherina 2



SEMINAR NASIONAL KEMARITIMAN 29 September 2023

LAYAR TERKEMBANG MENUJU INDONESIA MAJU

















SALAM MARVES!

Pada Kuartal tiga tahun 2023 ini, ada banyak perayaan yang kita rayakan bersama. Seperti Hari Kemerdekaan Bangsa pada 17 Agustus dan Hari Maritim Nasional ke 59.

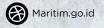
Kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan semarak dan penuh suka-cita dengan berbagai lomba dan upacara yang khidmat oleh seluruh insan Marves.

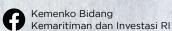
Tahun ini, adalah tahun ketiga Kemenko Marves mengadakan perayaan Hari Maritim Nasional. Dua tahun sebelumnya dirayakan berpusat di Jakarta, maka tahun ini kami mengajak #TimMarves sekalian untuk merayakannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

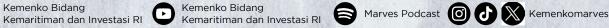
Pada majalah TW3 ini, selain cuplikan perayaan kedua even tersebut kami juga menyuguhkan program kerja yang berhasil terlaksana dengan baik seperti penyelenggaraan ISF 2023, Rakornas 5 DPSP, Festival Negeri 1.000 Ombak, serta Seminar Nasional Kemaritiman dan rangka Hari Maritim Nasional ke-59.

Semoga keseluruhan artikel yang kami suguhkan, dapat meningkatkan kebanggaan kita bersama sebagai Indonesia.

Selamat Membaca!



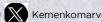












KILAS Juli - Se

























BALIK

ptember





















Perayaan Hari Puncak Maritim ke-59 yang bertepatan pada tanggal 27 September, dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur



KEMARITIMAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA MENJADI WARISAN PENTING UNTUK DINIKMATI GENERASI PENERUS

enteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan sampaikan penataan ruang laut dalam rangka mendorong Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ia menjabarkan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim, perlu adanya rencana tata ruang wilayah nasional terintegrasi berwawasan nusantara. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya maritim, menjadi poros penting pelayaran dunia, jalur utama telekomunikasi nasional dan global, pusat blue carbon dan energi terbarukan dari laut menjadi aspek penting dalam mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim Indonesia.

"Indonesia memiliki visi yang besar pada tahun 2045. Indonesia ditargetkan dapat keluar menjadi negara berpendapatan tinggi. Namun tidak hanya itu, Indonesia juga berkeinginan untuk menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut bukanlah hal yang mudah. Kita butuh tumbuh di kisaran 6%, dari pertumbuhan saat ini di kisaran 5%. Merealisasikan potensi di sektor maritim menjadi kunci," jelas Menko Luhut dalam sambutannya pada acara Marine Spatial Planning and Services Expo 2023 di Jakarta pada Selasa (19/9).



Menko Luhut menjelaskan bahwa potensi tersebut masih belum kita sadari sepenuhnya. Jika merujuk pada Sejarah, karakter Indonesia sebagai bangsa maritim didahului oleh para pendahulu kita, yang telah mendedikasikan diri berjuang melalui diplomasi politik selama lebih dari 25 tahun mulai dari Deklarasi Djuanda di tahun 1957 hingga United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Menko Luhut menekankan bahwa estafet Deklarasi Djuanda dalam penataan ruang laut dan wilayah sama pentingnya dengan penataan ruang darat.

"Perspektif pembangunan perencanaan dan penataan ruang nasional mulai dibenahi untuk lebih menyesuaikan diri terhadap karakter Bangsa Maritim, dan menghadirkan kembali cakrawala pandang eksternalitas yang sejalan dengan wawasan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi Indonesia. Dengan modal yang dimiliki dan visi ke depan untuk menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia, sudah saatnya kita mengoptimalkan potensi sumber daya maritim bagi kemakmuran, keberlanjutan, dan kedaulatan. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mampu mewujudkan diri sebagai jalur dan poros penting pelayaran, telekomunikasi dan energi bagi dunia," papar Menko Luhut.

Dalam Laman Instagram Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves, Menko Luhut turut memberikan ucapan Selamat untuk Perayaan Hari Maritim Nasional (23/9)

"Perjalanan panjang, semenjak kemerdekaan Bahasa kita telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan maritim. Pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan potensi maritim melalui berbagai program dan kebijakan inovatif. Tidak hanya itu pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan dan penanggulangan perubahan iklim, juga menjadi bagian penting dari agenda kemaritiman. Kita harus turut bekerja sama, untuk menjaga ekosistem laut dan memastikan generasi kedepan yang dapat menikmati warisan kemaritiman. Pada perayaan Hari Maritim Nasional tahun ini mari kita manfaatkan untuk lebih berkomitmen, dalam menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya maritim dengan bijak. Dengan memanfaatkan potensi maritim secara optimal kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan konektifitas antar pulau dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir saya ingin mengajak seluruh elemen Masyarakat, Pemerintah Daerah, Sektor swasta, akademia serta seluruh lapisan Masyarakat, untuk terus bersinergi dan bekerja sama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mari kita jaga kebersamaan dalam menjaga semangat bergotong royong dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. Selamat Hari Maritim Nasional ke 59 Wassalamualaikum Wr. Wb"





INDONESIA 2023 43 RD

5 SEPTEMBEI





KEMENKO MARVES TERUS GAUNGKAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA UNTUK TETAP TINGKATKAN POTENSI ASEAN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan kunjungan kerja ke Nairobi, Afrika pada tanggal 13 Juli 2023, bertemu dengan Presiden Kenya William Ruto di Istana Presiden Kenya. Dalam kunjungan ini, Menko Luhut memimpin delegasi yang terdiri dari pejabat tinggi Kementerian dan Lembaga serta unsur bisnis dari BUMN dan swasta.



unjungan yang merupakan persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kenya bulan Agustus nanti juga berhasil menyepakati beberapa hal, baik dalam kerangka G-to-G, maupun B-2-B.

Dalam hal G-to-G, pemerintah Kenya dan Indonesia telah menyepakati *Letter of Intent* kerja sama bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kunjungan juga mendorong penyelesaian dokumen kerja sama pertahanan bilateral serta finalisasi negosiasi Preferential Trade Agreement untuk mendorong hubungan dagang antar kedua negara.

Kunjungan ini juga melambangkan semangat Bandung tahun 1955, yang mengarah pada dekolonisasi Kenya, dan merupakan bukti sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan bersama.

Selanjutnya peningkatan kerja sama Internasional juga terwujud pada tanggal 09 Agustus 2023, Indonesia kembali menjadi tuan rumah *World Water Forum* (WWF) ke-10. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dipilih menjadi ketua panitia nasional WWF ke-10 yang akan digelar di Bali pada Mei 2024 mendatang. Adapun tema yang digaungkan adalah *Water for Shared Prosperity.*

"Isu air ini sangat penting untuk masyarakat dunia. Kita mau forum ini berjalan seperti G20, sehingga anggota forum dapat merumuskan langkah konkrit atas program dan isu-isu yang dibahas. Harapannya ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dunia." tutur Menko Luhut.

"Pemerintah Indonesia dipilih oleh *World Water Council* pada kesempatan *World Water Forum* ke 9 di Dakar. Kita dipilih *World Water Forum* ke 10 yang nantinya akan diselenggaran di BNDCC Bali pada tanggal 18-24 Mei 2024," ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR Dadang Rukmana di media briefing pada Rabu (09-08-2023).

Pada perhelatan WWF nanti, topik-topik yang dibahas mencakup beragam aspek seperti pengelolaan sumber daya air, keberlanjutan, akses air bersih dan sanitasi,



adaptasi perubahan iklim terhadap sumber daya air, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang terkait dengan air. Forum ini juga memberikan kesempatan bagi negara-negara dan komunitas internasional untuk berkolaborasi dalam mencari solusi konkret untuk tantangan-tantangan air yang dihadapi dunia saat ini.

WWF terdiri dari 3 proses, yang pertama adalah proses politik yang merupakan proses untuk mengajak pada pengambil kebijakan, para kepala negara, kepala daerah di dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan air, Indonesia akan mengundang 22 negara, yaitu 9 negara penyelenggara WWF sebelumnya, 10 negara ASEAN, 3 negara sahabat yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan COP 28 dan event—event lain yang terkait dengan keairan dan perubahan iklim.

Yang kedua adalah proses tematik, merupakan proses untuk mengidentifikasi berbagai isu keairan dan mengembangakan rencana aksi dan menfasilitasi implementasinya serta memobilisasi berbagai organisasi dan pakar untuk mengatasi isu-isu yang dikaitkan dengan sub tema dan topik dengan tema besar.

Yang ketiga adalah proses regional, yaitu untuk menfasilitasi Kerjasama sub regional seperti, penanganan sumber daya air di Mediterania, Amerika, Asia Pasifik, dan di Eropa itu semua akan ada prosesproses tersendiri yang berujung pada deklarasi Bali.

Di awal September 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan hadir sebagai pembicara dalam acara pembukaan *The ASEAN Business and Investment Summit* (ABIS) 2023 yang diselenggarakan oleh Boston *Consulting Group* (BCG) dan *ASEAN Business Advisory Council* (ASEAN BAC) dengan mengusung tema *'Realizing The US\$20Th Asean Centrality Opportunity And What It Means For Ceos'* pada Minggu (3-9-2023).

Dalam kesempatan tersebut Menko Luhut memaparkan mengenai peluang investasi ASEAN dan kolaborasi dunia usaha dalam membuka potensi sentralitas ASEAN. "Transisi energi adalah tantangan dan peluang bagi ASEAN, yang menyiratkan transformasi seutuhnya dalam memproduksi, mengonsumsi, dan mengalokasikan sumber daya," jelasnya.

Energi terbarukan, kendaraan listrik, penyimpanan energi, critical minerals, dan carbon offset merupakan peluang dalam transisi energi. Untuk mencapai *The US\$20Tn Asean Centrality*, ASEAN perlu lebih banyak kolaborasi.



PERCEPAT DEKARBONISASI DI INDONESIA

Pemerintah Dorong Penerapan Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

emerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas demi memenuhi kebutuhan domestik. Salah satu yang dilakukan ialah dengan menerapkan atau mengimplementasikan teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) guna mempercepat dekarbonisasi di Tanah Air.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi, mengungkapkan penerapan CCS sangat penting dan Indonesia saat ini berada di posisi utama untuk menjadi pusat CCS regional atau CCS Hub.

Kebijakan CCS di Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya beberapa regulasi yang telah disahkan yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023. Kini, tengah dilakukannya koordinasi dan diskusi untuk pengesahan Peraturan Presiden terkait CCS di tahun 2023 ini, diharapkan menjadikan Indonesia sebagai pasar yang lebih menguntungkan.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon. Kami menyadari bahwa CCS merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam upaya ini dimana Pemerintah telah memainkan peran utama dalam mendorong implementasi CCS dengan mengeluarkan kebijakan pendukung untuk investasi dalam proyek-proyek CCS masa depan," kata Jodi dalam acara *The 1st International and Indonesia CCS Forum* (IICCS Forum) di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Jodi yang juga sebagai Dewan Pengawas Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) menjelaskan pemerintah juga terbuka untuk bekerja sama dengan sektor industri dalam mengidentifikasi peluang dan solusi atas hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi CCS.

Perubahan iklim global merupakan isu penting yang membutuhkan respons bersama, baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu solusi untuk menangani perubahan iklim global akibat emisi gas rumah kaca ini adalah dengan menerapkan teknologi CCS.



"Indonesia memiliki formasi geologi yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan emisi karbon secara permanen. Selain itu, lokasi Indonesia yang strategis di kawasan Asia Pasifik dapat menjadikan Indonesia sebagai regional CCS Hub yang tentunya akan menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," terangnya.

Di samping itu, Jodi juga memaparkan bahwa pemerintah senantiasa memberikan dukungan bagi pengembangan CCS dalam mencapai masa depan yang lebih bersih dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 kepulauan, memerlukan investasi yang besar untuk meningkatkan industri CCS dalam negeri.

Pencapaian ini harus dilakukan dengan langkahlangkah strategis, terukur, dan berkelanjutan.

"Kemenko Marves terus menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, terutama dengan ICCSC yang menjadi kolaborator strategis dalam pengembangan





CCS di Indonesia. Kami mengajak para pemangku kepentingan untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan ini dan bersama-sama mewujudkan visi kita untuk dunia yang lebih baik," tambahnya.

Dia menerangkan ICCSC akan berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi CCS Indonesia untuk menjadi CCS Hub. Perannya yang mendasar dalam menghimpun pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dari berbagai negara dan sektor menjadikannya mitra strategis dalam memajukan implementasi CCS di Indonesia. Sisi lain, dukungan pemerintah dalam pengembangan CCS ditunjukkan oleh penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang CCS untuk memperluas implementasi CCS termasuk CCS Hub, CCS lintas batas, CO² dari industri, dan pemanfaatannya di wilayah kerja non-migas.

"Dengan dihimpunnya pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dari berbagai negara dan sektor dalam IICCS Forum 2023, diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam menyusun regulasi untuk implementasi CCS di Indonesia. Dengan demikian, forum ini menjadi salah satu pendorong diterapkannya teknologi CCS di Indonesia yang tentunya akan menciptakan masa depan yang berkelanjutan, aman, dan sejahtera," tutup dia.

Sebagaimana diketahui, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO² ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan (*capture*) CO² dari sumber emisi gas buang (*flue gas*), pengangkutan CO² tertangkap ke tempat penyimpanan (*transportation*), dan penyimpanan ke tempat yang aman (*storage*).

Berdasarkan laporan lembaga *Institute for Essential Services Reform* (IESR) yang diterbitkan Juni 2022 lalu, hingga tahun 2021 terdapat 31 proyek CCS yang beroperasi secara komersial di seluruh dunia dan lebih dari 90 projek lainnya masih dalam tahap pengembangan. Angka ini terus meningkat dan merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Selain disebabkan oleh riset yang terus dilakukan, peningkatan jumlah proyek juga tidak terlepas dari dukungan berbagai negara terhadap teknologi CCS sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon.

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil emisi karbondioksida terbesar di dunia, telah merencanakan penggunaan CCS terutama di sektor ketenagalistrikan.





66

Indonesia memiliki visi yang besar pada tahun 2045. Indonesia juga berkeinginan untuk menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia.

"

Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi enteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan sampaikan penataan ruang laut dalam rangka mendorong Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ia menjabarkan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim, perlu adanya rencana tata ruang wilayah nasional terintegrasi berwawasan nusantara. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya maritim, menjadi poros penting pelayaran dunia, jalur utama telekomunikasi nasional dan global, pusat blue carbon dan energi terbarukan dari laut menjadi aspek penting dalam mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim Indonesia.

"Indonesia memiliki visi yang besar pada tahun 2045. Indonesia ditargetkan dapat keluar menjadi negara berpendapatan tinggi. Namun tidak hanya itu, Indonesia juga berkeinginan untuk menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut bukanlah hal yang mudah. Kita butuh tumbuh di kisaran 6%, dari pertumbuhan saat ini di kisaran 5%. Merealisasikan potensi di sektor maritim menjadi kunci," jelas Menko Luhut dalam sambutannya pada acara *Marine Spatial Planning and Services Expo* 2023 di Jakarta pada Selasa (19/9).

Menko Luhut menjelaskan bahwa potensi tersebut masih belum kita sadari sepenuhnya. Jika merujuk pada Sejarah, karakter Indonesia sebagai bangsa maritim didahului oleh para pendahulu kita, yang telah mendedikasikan diri berjuang melalui diplomasi politik selama lebih dari 25 tahun mulai dari Deklarasi Djuanda di tahun 1957 hingga *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Menko Luhut menekankan bahwa estafet Deklarasi Djuanda dalam penataan ruang laut dan wilayah sama pentingnya dengan penataan ruang darat.

"Perspektif perencanaan pembangunan dan penataan ruang nasional mulai dibenahi untuk lebih menyesuaikan diri terhadap karakter Bangsa Maritim, dan menghadirkan kembali cakrawala pandang eksternalitas yang sejalan dengan wawasan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi Indonesia. Dengan modal yang dimiliki dan visi ke depan untuk menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia, sudah saatnya kita mengoptimalkan potensi sumber daya maritim bagi kemakmuran, keberlanjutan, dan kedaulatan. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mampu mewujudkan

diri sebagai jalur dan poros penting pelayaran, telekomunikasi dan energi bagi dunia," papar Menko Luhut.

Langkah-langkah sistematis dalam penataan ruang laut yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Terintegrasi maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai bekal utama dan sekaligus blueprint menuju Kedaulatan dan Kejayaan Maritim Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Muhammad Firman Hidayat menyampaikan MSPS Expo 2023 ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menstimulasi dan menggalang gagasan, respons, dan dukungan yang dibutuhkan dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut Indonesia yang lebih baik.

"Semoga kegiatan ini dapat menggali ide, gagasan, dan khazanah pemikiran yang dapat digunakan sebagai alternatif atau solusi implementatif dalam perumusan kebijakan pengelolaan ruang laut, termasuk integrasi tata ruang darat dan laut, merangkul dan memberdayakan stakeholder terkait dalam mempromosikan dan mengedukasi pihak luas terkait berbagai aktivitas dan kiprah yang telah berjalan dan berkembang di dunia maritim di Indonesia maupun global, serta menggiring atensi dan dukungan khalayak luas untuk menciptakan iklim dan geliat akselerasi pengarusutamaan pembangunan maritim di Indonesia," ungkap Deputi Firman.

Menko Luhut berharap melalui agenda MSPS Expo 2023 ini dapat terhimpun sumbangsih pemikiran dan gagasan bagi penyempurnaan formula dan kebijakan penataan ruang wilayah nasional yang terintegrasi dan diharapkan mampu menggalang kekuatan baru untuk percepatan pembangunan maritim di Indonesia.

"Dan yang tak kalah penting, melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan atensi dan apresiasi khalayak luas untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan atas maritim sebagai identitas dan karakter bangsa Indonesia. Semoga *Marine Spatial Planning and Services Expo* 2023 ini dapat berjalan lancar dan sesuai harapan. Mari kita akselerasi langkah menuju Kedaulatan dan Kejayaan Maritim Indonesia," tutup Menko Luhut.

Peluncuran dan Bedah Buku bertajuk "Menuju Puncak Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat dan Laut" dan "Kabel Bawah Laut Sinyal Perekat Nusantara"

Bertepatan dengan penyelenggaraan Marine Spatial Planning and Services (MSPS) Expo 2023, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melakukan peluncuran dan bedah untuk dua buku bertajuk "Menuju Puncak Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat dan Laut" dan "Kabel Bawah Laut Sinyal Perekat Nusantara" pada Rabu (20/9) di Jakarta. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Firman Hidayat menyampaikan bahwa buku "Menuju Puncak Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat dan Laut" ini merupakan estafet atas buku "Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut, Satu Rencana Satu Tatakelola" yang telah kami terbitkan sebelumnya.

"Masih dalam koridor yang sama, merespon proses dan progres pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut yang masih berjalan, sejak amanat tersebut digulirkan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta



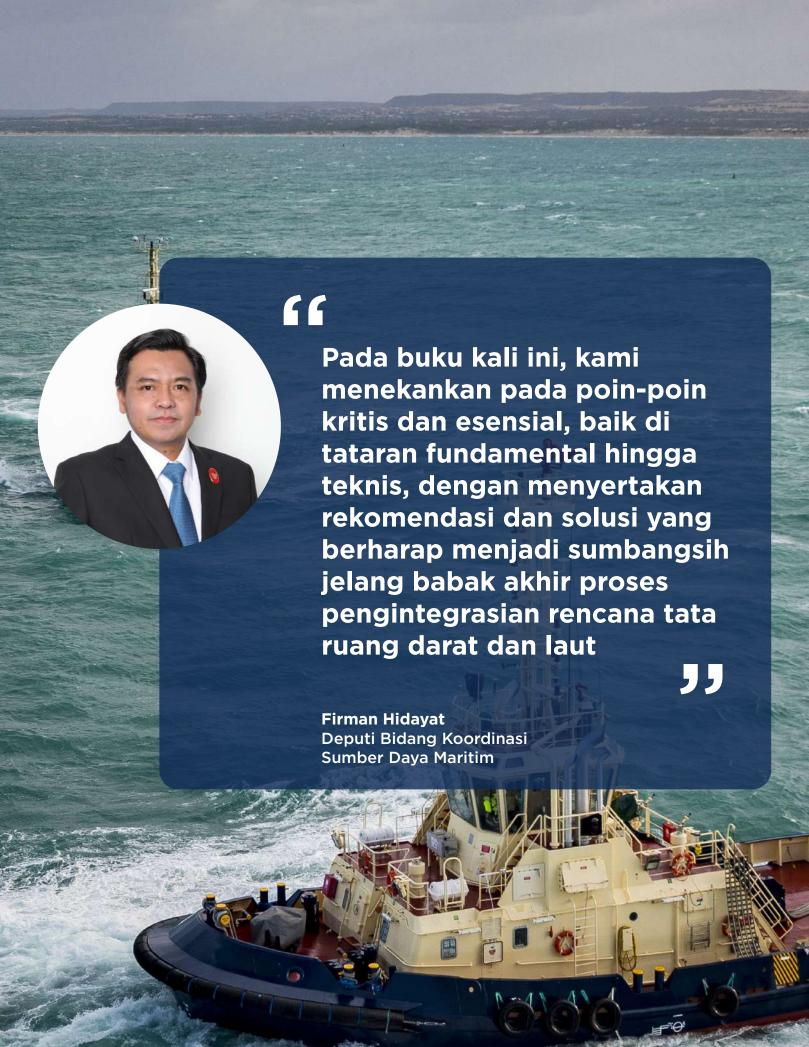




Kerja. Pada buku kali ini, kami menekankan pada poinpoin kritis dan esensial, baik di tataran fundamental hingga teknis, dengan menyertakan rekomendasi dan solusi yang berharap menjadi sumbangsih jelang babak akhir proses pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut," ungkap Deputi Firman.

Selain itu, Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Muhammad Rasman Manafi menjelaskan buku ini disusun di saat kita berada di depan gerbang periode pembangunan nasional jangka panjang berikutnya, 2025-2045. "Ujung dari periode baru tersebut adalah Indonesia Emas 2045, karena itulah kami berharap buku ini dapat memberikan andil bagi lahirnya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional hasil pengintegrasian yang mampu menuntun keberhasilan yang sebaik-baiknya menuju momentum yang teramat istimewa tersebut." tambah Asdep Rasman.

Yogi Yanuar, Analis Kebijakan Ahli Madya sebagai salah satu tim penulis menyampaikan bahwa buku ini terdiri dari dua bagian yakni Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi Ruang Laut Indonesia dan Mengawal Pencapaian Harapan Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat dan Laut.





ementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) selaku tuan rumah, bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) belum lama ini sukses melaksanakan *Indonesia Sustainability* Forum (ISF) 2023 di Jakarta, tepatnya di Park Hyatt Jakarta, pada 7-8 September 2023. Membahas isu-isu keberlanjutan di Asia Pasifik, ISF 2023 yang merupakan salah satu perhelatan besar ini dihadiri sekitar 2.000 orang dari 41 negara di dunia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan bahwa perhelatan ISF 2023 yang sekaligus bagian dari ASEAN-BAC Indonesia Summit 2023 yang digelar pada 1-8 September 2023 ini, merupakan salah satu wujud nyata Indonesia sebagai negara adidaya iklim untuk memperkuat kolaborasi lintas negara, serta kemitraan publik dan swasta demi terwujudnya agenda Sustainability dunia. "Kita harus bisa mempercepat transisi pertumbuhan berbasis emisi menuju pertumbuhan berkelanjutan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, secara pasti dan cermat. ISF juga merupakan sebuah momentum bagi Indonesia untuk mendorong dekarbonisasi global dan memacu praktik keberlanjutan dunia, imbuh Deputi Rachmat," jelasnya.

INDONESIA Dalam hal ini, Deputi Rachmat mengatakan besarnya animo peserta yang terdiri dari sejumlah petinggi pemerintahan seperti Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, pimpinan organisasi global seperti Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Georgieva, dan Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, serta lebih dari 100 pembicara dari sektor bisnis, masyarakat sipil, dan pemerintah yang berpartisipasi dalam 10 sesi pleno dan 14 sesi tematik di ISF 2023 ini menandakan adanya pergeseran positif di kawasan ini untuk mendukung agenda keberlanjutan, begitu pula dengan penandatanganan adanya kemitraan-kemitraan penting (MoU) dalam acara ini.







MoU 1

Kerja sama dan Implementasi Teknologi Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture, Utilization and Storage Technology) antara PT PLN (Persero) dan Karbon Korea Co. Ltd.



MoU 5

Kegiatan Pelestarian Lingkungan sebagai bagian dari Program Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan antara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan PT PLN (Persero).



MoU 2

Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Stanford Doerr School of Sustainability dan Otorita Ibu Kota Nusantara, yang menandakan ketertarikan Stanford University untuk mengembangkan kolaborasi penelitian dengan ibu kota baru Indonesia. Nusantara.



MoU 6

MOU antara China EV 100 dan PT Utomo Chargeplus Indonesia mengenai Riset Bersama (Joint Research) terkait Kerja Sama Kendaraan Listrik.

DATANGANI DALAM Lapility Forum 2023



MoU₃

Penguatan ketersediaan energi di Grid Sulawesi antara PT Vale dan PT PLN.

MoU 7

Peluncuran Pertamina Sustainable Academy, sebuah Akademi Minyak & Gas berkelanjutan yang berskala besar pertama di Asia.

MoU 8

Deklarasi Bersama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan PT PLN (Persero) tentang Dukungan Infrastruktur Pengisian Daya dan Ekosistem Penukaran Baterai untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.



MoU 4

Penandatanganan Letter of intent terkait Pengembangan Fasilitas Modul Solar Photovoltaic (Solar PV) dan BESS untuk mendorong pertumbuhan industri Energi Terbarukan Indonesia dan Menghasilkan Energi Hijau.



Deputi Rachmat mengungkapkan bahwa kolaborasi ini dapat menjadi kunci untuk meruntuhkan hambatan bagi dunia dalam merangkul pertumbuhan keberlanjutan, khususnya hambatan tingginya pembiayaan, keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya manusia. Dalam hal ini, dirinya juga menegaskan bahwa agenda keberlanjutan bukanlah kegiatan yang bersifat check-the-box bagi pemerintah dan dunia usaha, namun lebih merupakan sebuah perubahan model bisnis dalam konsumsi dan pertumbuhan guna memastikan bahwa kemajuan menuju kemakmuran dapat terus berlanjut dengan cepat, sekaligus melindungi planet kita. "Dalam konteks ini, kemitraan sektor publik dan swasta dapat mendukung terciptanya ekosistem untuk bisnis hijau dan baru untuk tumbuh," ielas Deputi Rachmat.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Kamdani, mengatakan bahwa Forum ini memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk memberikan kontribusi yang konkret dan berarti bagi agenda keberlanjutan. "Komunitas bisnis Indonesia siap mengemban tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa praktik-praktik keberlanjutan tertanam dalam bisnis model dan operasional kami. Sektor swasta telah menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, oleh karena itu setiap perubahan positif yang kita upayakan untuk mendukung agenda keberlanjutan akan memberikan efek domino yang positif bagi masyarakat

dan planet ini. Kami ingin semakin memperkuat kolaborasi konkret yang terbentuk melalui forum ini dalam beberapa minggu dan bulan mendatang," ujar Shinta.

Di sektor usaha, Arsjad Rasjid selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) dan Ketua *ASEAN Business Advisory Council* (ASEAN-BAC) mengungkapkan bahwa dunia usaha memiliki peran yang krusial untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dalam transisi ekonomi hijau. Dirinya juga menegaskan bahwa usaha memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk ekosistem bisnis yang berkelanjutan dalam perjalanan menuju ekonomi hijau. Oleh sebab itu, Kadin Indonesia aktif mendorong inisiatif seperti Net Zero Hub dan Carbon Center of Excellence termasuk mobilisasi investasi hijau melalui kolaborasi lintas sektor baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Diharapkan melalui inisiatif ini, sektor industri dan bisnis di Indonesia dan ASEAN dapat bersatu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan kondusif.

Diketahui Gelaran yang mengusung tema besar "Pursuing Sustainable and Inclusive Growth" ini juga telah menggandeng beberapa institusi global sebagai Knowledge Partner, di antaranya adalah McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Tony Blair Institute for Global Change, dan badan usaha milik negara seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, serta pelaku bisnis global seperti Sinarmas dan AstraZeneca.



66

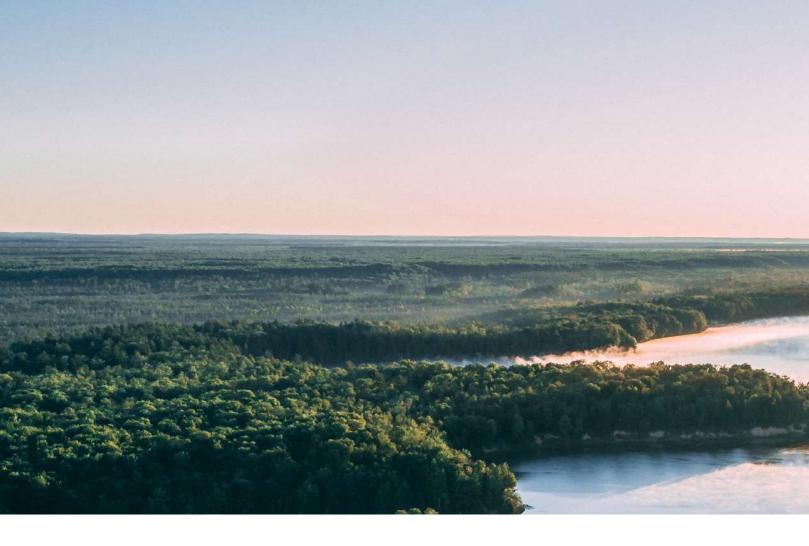
Komunitas bisnis Indonesia siap mengemban tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa praktik-praktik keberlanjutan tertanam dalam bisnis model dan operasional kami.

"

Rachmat Kaimuddin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

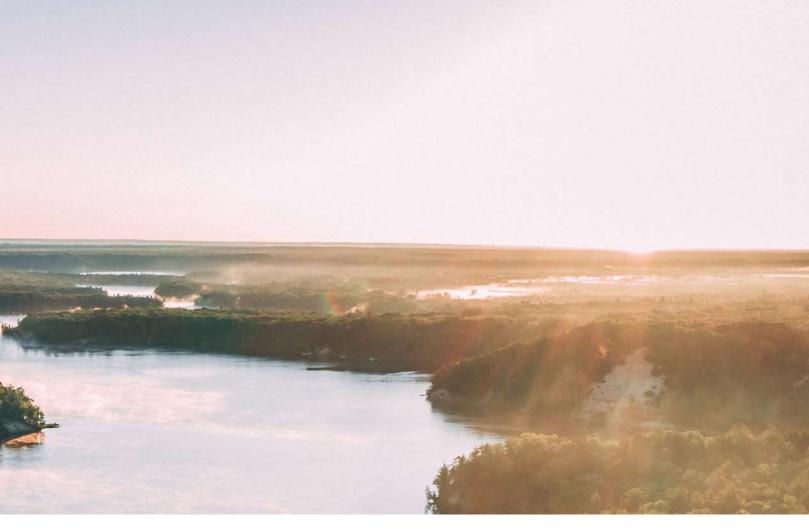






PENGELOLAAN LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Indonesia memiliki visi menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045. Pembanguan berkelanjutan, merupakan slah satu Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut.



ada Seminar Nasional Kemaritiman sebagai rangkaian kegiatan perayaan Hari Maritim Nasional ke-59 tahun 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan sempat mengutarakan pandangannya bahwa pertumbuhan berkelanjutan dapat terlaksana jika didukung salah satunya dengan pengelolaan lingkungan yang baik.

"Untuk menjaga kelautan yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan Tindakan konkret dalam pengelolaan sampah," tutur Menko Luhut.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti, sebagai Deputi yang membidangi isu lingkungan telah berbagai hal dalam Upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik demi Pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satunya kerja sama Kemenko Marves dengan PT. PLN (Persero) untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan Pembangunan yang berkelanjutan pada forum tematik Indonesia Sustainability Forum (ISF) pada Kamis (7/9) di Jakarta.

Deputi Nani menyampaikan Kemenko Marves perlu secara strategis menjalankan perannya khususnya pada issue pengendalian perubahan iklim dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

"Kerja sama dengan PLN ini merupakan kerja sama pelestarian lingkungan dengan pihak non-kementerian/lembaga pemerintah yang meliputi keragaman hayati, rehabilitasi mangrove, pemanfaatan FABA dan pemberdayaan masyarakat melalui UKM. Secara khusus dalam pemenuhan target dalam RPJMN yakni rehabilitasi mangrove, kami memberikan apresiasi kepada PLN yang telah bersedia turut berkontribusi dalam hal ini," ujar Deputi Nani.

la juga menjelaskan salah satu tujuan rehabilitasi mangrove nasional adalah mewujudkan perlindungan penduduk pesisir yang rentan bencana alam dan perubahan iklim. Melalui rehabilitasi mangrove diharapkan tumbuh benteng hijau di pesisir Indonesia yang sekaligus menjadi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



Kerja sama dengan PLN ini merupakan kerja sama pelestarian lingkungan dengan pihak non-kementerian/lembaga pemerintah yang meliputi keragaman hayati, rehabilitasi mangrove, pemanfaatan FABA dan pemberdayaan masyarakat melalui UKM.

Nani Hendiarti Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan "Penandatanganan NKB ini merupakan bagian dari aksi konkrit pengendalian perubahan iklim, yang dilakukan bersama-sama lintas kementerian dan lembaga sesuai dengan kapasitas, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing pihak," ujar Deputi Nani.

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung sinerg yang telah dibangun Kemenko Marves bersama PT PLN dalam kegiatan pelestarian lingkungan berupa pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitas mangrove, pemanfaatan abu terbang dan abu dasar (fly ash bottom ash/FABA) yang dihasilkan oleh PLTU, pemberdayaan masyarakat melalui usaha keci menengah dan pengembangan ekowisata, khususnya di sekitar site-site PT PLN.

"Kita perlu melakukan lebih banyak kerja sama dalam rehabilitasi mangrove, karena program rehabilitasi mangrove 600.000 hektar merupakan program rehabilitasi yang terbesar di dunia. Untuk itu program ini tidak hanya menanam, tapi juga memelihara. Termasuk merawat biodiversitas dalam ekosistem mangrove. Juga mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat menerima manfaat mangrove sekaligus turut memelihara." ujar Deputi Nani.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, pihaknya menyambut baik atas NKB yang dilakukan. Darmawan memandang, kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen PLN untuk melestarikan lingkungan dan memastikan bumi layak huni bagi generasi saat ini dan mendatang. Hal ini tentunya juga menguatkan posisi PLN dalam menjalankan prinsip *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang telah dilakukan selama ini

"Kami menyambut baik kerja sama ini, sebagai pedoman kemitraan nasional dalam meningkatkan sinergi dan koordinasi antar lembaga, dalam upaya kegiatan pelestarian lingkungan dan ekosistem mangrove. Hal ini merupakan implementasi prinsip ESG yang dijalankan PLN guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekonomi dan lingkungan," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, sejak tahun 2023, PLN dan Kemenko Marves telah berkolaborasi dalam beberapa program. Di antaranya, penanaman mangrove di area Pantai Utara pulau Jawa, Banten, sebagai restorasi dan pelindung pesisir pantai dari abrasi yang semakin kuat.

Lalu, pemanfaatan FABA sebagai paving block jalan setapak di Taman Sains dan Teknologi Herbal (TSTH) Humbang Hasundutan, pemanfaatan FABA PLTU Ombilin sebagai pupuk silika sekaligus pembenah tanah (amelioran) mempercepat pemulihan lahan bekas tambang untuk kemudian dijadikan Hutan Tanaman Energi. Baru-baru ini melalui kolaborasi BUMN; PLN, PT Bukit Asam dan Pelindo juga bekerja sama dengan Kemenko Marves dalam Aksi Tanam Mangrove #KerjaBersamaHijaukanIndonesia di Tangerang, Banten.

Pada kesempatan berbeda. Deputi Nani juga terkait mengutarakan iurus Indonesia kebut pembangunan berkelanjutan dalam acara Evening Up - Sustainable Future pada kanal berita CNBC Indonesia pada Senin (25/9). Deputi Nani menjabarkan beberapa langkah konkret yang telah dilaksanakan guna mendorong hal tersebut di antaranya pertama, melakukan percepatan program perhutanan sosial yang akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar Kawasan hutan, menyelesaikan konflik tenurial sekaligus perlindungan lingkungan.

"Dari83.381desadiIndonesia, sekitar 25.863desaterletak di sekitar kawasan hutan yang 70% masyarakatnya mengantungkan hidup pada sumberdaya hutan. Namun sebanyak 10.2 juta (36.73%) masyarakatnya dalam kondisi miskin. Dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi Masyarakat, sejak 2 tahun lalu, kami bersama KLHK menginisiasi Pengembangan Wilayah Terpadu atau Integrated Area Deveploment (IAD) berbasis Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Lumajang dan Belitung sebagai model pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi masyarakat," jelas Deputi Nani.

Saat ini IAD tersebut akan direplikasi ke 20 kabupaten lain di antaranya Buleleng, Garut, Berau, Ngada, dan lainnya. Deputi Nani melanjutkan ada sekitar 18 juta penduduk yang tinggal di DAS Citarum. Selain itu, 11 juta penduduk di DKI Jakarta sekitar mengantungkan kebutuhan air bakunya dari Sungai Citarum. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan langkah konkret kedua yaitu dengan percepatan pemulihan kerusakan DAS Citarum.















"Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan kerusakan DAS Citarum berkontribusi untuk kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera, meningkatkan akses terhadap higienis dan air bersih, energi yang terjangkau, menciptakan kota yang berkelanjutan serta memperbaiki ekosistem daratan," tambah Deputi Nani.

Selain itu, langkah konkret selanjutnya adalah pengelolan sampah yang baik dan terintegrasi hulu-hilir adalah komponen penting dalam mencapai berbagai SDGs dan mendukung keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara keseluruhan.

"Untuk itu kami mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular dengan memaksimalkan penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), dan pemulihan produk dan material yang sudah tidak terpakai menjadi sumber daya yang berharga lagi. Pengolahan sampah menjadi energi listrik, RDF dan produk lainnya telah kami dorong untuk menangani sampah di perkotaan sekaligus mengoptimalkan manfaatnya untuk bauran energi terbarukan. Hal ini juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk bersinergi," jelas Deputi Nani.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

"Contoh transisi energi guna menunjang ekonomi hijau melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan, antara lain biofuel, biogas, panel surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik EBT, carbon capture and storage, dan smart grids. Dengan bantuan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) akan diimplementasikan Early Retirement PLTU batu bara dengan digantikan oleh EBT," ungkap Deputi Nani.

Deputi Nani juga menjabarkan tantangan utama dalam pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya lingkungan dan kehutanan di Indonesia saat ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang lestari



KEMENKO MARVES ADAKAN RAKORNAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN 5 DPSP SEMESTER I TAHUN 2023

Dalam rangka mensinergikan serta merumuskan strategi akselerasi pengembangan 5 DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) yang harus diselesaikan pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaksanakan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Percepatan Pengembangan 5 DPSP Semester 1 Tahun 2023 di Plataran, Borobudur, Jawa Tengah, Jumat (21-07-2023) dengan mengusung tema "Pariwisata Berkualitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Pengembangan 5 DPSP merupakan salah satu instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo guna meningkatkan pariwisata di Indonesia.
Adapun kelima DPSP tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Rakornas Percepatan Pengembangan 5 DPSP ini dipimpin oleh

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan

Pada kesempatan tersebut, Menko Luhut mengatakan bahwa dalam Rakornas ini banyak hal yang dibahas dan terdapat kemajuan yang signifikan. Karena itu perlu dukungan dari kementerian lembaga (K/L) dan instansi terkait untuk mendorong kemajuan 5 DPSP. Tidak hanya itu, Menko Luhut juga mengungkapkan

semua DPSP yang saat ini dilakukan pengembangan untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dalam proses pembangunannya harus memperhatikan semua aspek, termasuk keindahannya. Ia mencontohkan kabel untuk kepentingan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi harus ditanaman di bawah tanah sehingga lebih rapi.

"Selain menjadi rapi, kita harus perhatikan juga terkait infrastruktur-infrastruktur (yang dibangun) di *tourist* destination, di mana harus dengan kearifan lokal. Saya ulangi harus kearifan lokal," tegasnya.

Menko Marves menambahkan bahwa aspek atau kebutuhan yang belum terpenuhi atau terwujud secara bertahap akan disesuaikan

dengan kebutuhan yang ada.

Di samping itu, Menurutnya, dari 5 DPSP yang ada saat ini, salah satu yang cukup menarik wisawatan ialah Candi Borobudur. Sehingga harus dikembangkan dan dikemas sedemikian rupa.

"Borobudur ini menjadi salah satu yang menarik (banyak turis). Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar, pemasukan negara dengan dua juta turis yang bisa kita dapat dari situ," tuturnya menambahkan.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyampaikan bahwa semua progres pengerjaan konten terus dilakukan. Harapannya tentu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. "Ini akan menjadi sebuah terobosan

Menparekraf Dikatakan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diwujudkan dan ditingkatkan dalam menunjang pengembangan pariwisata di Indonesia, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang baik. Ia bersyukur terkait ini sudah disinggung atau sudah diakomodir dalam undang-undang kesehatan untuk penyediaannya kedepannya.

untuk membuka peluang

besar," kata Menparekraf

Sandi.

"Borobudur ini menjadi salah satu yang menarik (banyak turis). Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar, pemasukan negara dengan dua juta turis yang bisa kita dapat dari situ"

Luhut B. Pandjaitan Menko Marves

Sejalan dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab dengan tata ruang termasuk dalam pengembangan 5 DPSP yang saat ini terus dikembangkan. Karena itu, ia berharap dalam pengembangan yang saat ini dilakukan tentu diperlukan kerja sama yang baik dalam mewujudkannya.

"Dimana tanah adalah aset negara, sehingga kita perlu

kolaborasi, kita lakukan koordinasi sehingga aset ini bisa kita kelola untuk kepentingan pariwisata," ujarnya. Menteri Hadi memandang dalam pengelolaan tata ruang, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah guna menentukan tata ruang yang baik. Terkait dengan penyediaan internet atau jaringan telekomunikasi harus ditanam.

"Seluruh kabel bagian atas itu akan kita tanam sesuai

dengan tata ruang dan kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menata tata ruang, sehingga tidak berserakan

kabel kabel di atas," terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membatasi pembangunan gedung yang berpotensi mengurangi keindahan lokasi-lokasi wisata yang menjadi prioritas dan menjadi

atensi pemerintah selama ini. "Dalam tata ruang kami batasi tidak banyak gedung-gedung diatas bukit yang akan menghilangkan keindahan wisata," bebernya.

Dalam kesempatan yang sama. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono setuju dengan apa yang disampaikan Menko Marves maupun Menparekraf terkait penyediaan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah 5 DPSP.

Faktanya adalah banyak

masyarakat yang melakukan perjalanan keluar negeri untuk berobat, sehingga banyak dana dari masyarakat digunakan di luar negeri. Hal ini menjadi kerugian bagi Indonesia karena tidak bisa menyediakan sarana fasilitasi kesehatan yang tidak mumpuni dengan maraknya pengobatan di luar negeri.

Karena itu, sambung Wamenkes, pemerintah akan membangun rumah sakit-rumah sakit yang bertaraf internasional sehingga tidak perlu berobat ke luar





negeri. Padahal, jika ada penyediaan fasiliatas kesehatan yang baik itu maka pemerintah akan mampu melakukan penerimaan negara dari kegiatan kesehatan tersebut. "Tentu ini akan kita buat secara serius dengan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di luar negeri," pungkasnya.

Dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 5 DPSP ini membahas beberapa aspek yang menjadi poin utama, di antaranya memastikan pencapaian target kunjungan wisman, wisnus, dan integrasi BBI/PDN dengan BBWI, mengakselerasi penyelesaian pembangunan 5 DPSP; mengakselerasi implementasi prinsip biru, hijau dan sirkular; mendorong investasi yang tepat sasaran dan pendanaan yang berkelanjutan, dan mengakselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata.

Keseluruhan upaya pengembangan 5 DPSP menjadi destinasi pariwisata berkualitas harus dipastikan dapat diselesaikan pada 2024. Pencapaian target wisman dan wisnus tahun 2023 dapat menjadi indikator utama yang mencerminkan kesiapan 5 DPSP menjadi destinasi pilihan utama menyambut momentum pemulihan pariwisata global pada 2024. Oleh karena itu, perlu kolaborasi strategi dan tujuan, serta evaluasi progres rencana aksi antar K/L, pemerintah daerah dan industri pendukung, untuk memastikan tercapainya target wisman, wisnus, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Sebagai informasi, Rakornas ini diselenggarakan Kemenko Marves bekerja sama dengan Badan Otorita Borobudur (BOB). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah menteri yakni Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), serta Wamen Kesehatan Dante Saksono. Selain para menteri, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.



Setelah bertahun-tahun lamanya Indonesia bergantung pada ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah, ketergantungan tersebut menyebabkan Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan yang tinggi ketika harga komoditas jatuh. Namun Indonesia tengah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia, berbekal sumber daya alam yang dibutuhkan untuk transisi energi. Pemerintah berupaya melakukan transformasi ekonomi, melalui kebijakan hilirisasi sumber daya alam untuk mendorong pengembangan rantai nilai industri bernilai tambah tinggi.

Hilirisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan. Mendorong industrialisasi komoditas ke arah produk bernilai tambah tinggi menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks adalah tujuan kebijakan hilirisasi. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Rifky Setiawan menyampaikan ke depan pengembangan kebijakan hilirisasi dilakukan dengan pertama, membangun basis industri dengan nilai tambah tinggi untuk mendukung digitalisasi ekonomi yang semakin cepat dan tren ekonomi hijau. Kedua, mengalokasikan sumber energi rendah emisi (hijau) untuk industri dengan nilai tambah tinggi. Ketiga, membangun sistem pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri, melalui kerjasama perguruan tinggi dan pelaku usaha agar dapat diarahkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan kelas dunia di bidang teknologi. Ia menambahkan bahwa hilirisasi pertambangan Indonesia dapat menjadi peluang dan langkah menuju masa depan.

"Kinerja penanaman modal asing (PMA) tahun 2022 mencetak rekor tertinggi, hilirisasi industri mendorong peningkatan investasi yang lebih merata. Kontribusi



sektor sekunder (manufaktur) terus mengalami peningkatan seiring dengan hilirisasi dan share investasi PMA di luar Jawa juga terus mengalami peningkatan," jelas Sesdep Rifky pada acara Infrastructure Business Forum dalam rangka Main Event Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rabu (13/9/2023) di Jakarta.

Program hilirisasi mampu mendorong kinerja ekonomi Indonesia, bahkan menjadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara anggota G20. Deputi Firman menjelaskan melalui upaya transformasi ekonomi, Indonesia akan mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan melakukan hilirisasi, nilai ekspor yang berasal dari nikel meningkat berkali lipat.

Sebelum larangan ekspor nikel diterapkan, Indonesia

mengekspor bijih nikel dengan jumlah yang besar dan didominasi tujuan ke Tiongkok. Saat ini dengan adanya hilirisasi nikel mendorong ekspor turunan nikel dan saat ini Indonesia sudah mampu mengekspor produk bahan baku baterai tidak hanya besi dan baja. Tingginya ekspor turunan nikel juga mengurangi ketergantungan indonesia terhadap ekspor bahan mentah. Nilai ekspor bijih nikel dan turunannya pada 2013 hanya mencapai USD 5,4 miliar. Kemudian, melalui kebijakan hilirisasi, nilai ekspor turunan nikel tahun 2022 mencapai USD35,6 miliar atau 6,6x lipat lebih tinggi.

Lebih lanjut, Sesdep Rifky menyampaikan bahwa kinerja ekspor turunan nikel pada 2022 tumbuh 43% dibandingkan pada 2017. Oleh karena itu, fokus kebijakan selanjutnya diarahkan pada pengembangan industri baterai dan *electric vehicle* (EV). Di samping itu, adanya hilirisasi juga meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

"Secara global, transisi kendaraan konvensional ke EV

bergerak semakin cepat dan Indonesia akan mengikuti dengan tren konsumen yang mendukung. Pasar otomotif Indonesia akan mengikuti transisi kendaraan listrik, dengan tren konsumen yang mendukung," ungkap Sesdep Rifky.

Tujuan utama hilirisasi nikel adalah menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik. Selain itu, tingginya permintaan kerja juga mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui pembukaan politeknik dan jurusan baru di kawasan hilirisasi. Tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, transfer teknologi dan pengembangan SDM menjadi bagian penting dari hilirisasi.

Kemenko Marves juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), dan Universitas Kaltara, sejumlah 80 siswa peserta program beasiswa Vokasi Mandarin. Terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Energi Hijau terbesar di Kalimantan Utara, hal ini merupakan

kesempatan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang akan berkontribusi di dalam kawasan industri ini. Program beasiswa ini memberikan kursus intensif Bahasa Mandarin yang diharapkan dapat meningkatkan SDM yang berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di Kaltara, khususnya di Bulungan. Terlebih lagi, banyaknya perusahaan Tiongkok masuk ke kawasan industri yang sudah dalam pembangunan mengingatkan pentingnya program beasiswa ini.

Pemerintah Indonesia juga akan selalu memastikan apabila hilirisasi yang sedang berjalan menjunjung aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pertama, regulasi dan standardisasi mengenai keberlanjutan yang berlaku di Indonesia. Kedua, energi bersih yang akan mendukung proyek Indonesia berikutnya sedang dikembangkan. Terakhir, pembuangan limbah industri akan dilakukan seaman mungkin.

Masih banyak potensi hilirisasi di komoditas lainnya dan produk turunan dari hilirisasi produk yang sudah ada. Industri hilir terus berlanjut dengan pengembangan rantai pasok industri baterai dan Kawasan Industri Kalimantan Utara (KIPI) akan menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Potensi nilai tambah hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah

dapat mencapai 3 - 180 kali lipat dari bijih.

Hilirisasi dari bauksit, tembaga, dan timah juga
mendukung *value chain electric vehicle.*

Hilirisasi juga akan didorong untuk memperkuat rantai nilai panel surya domestik sehingga indonesia mampu menjadi pemain besar di industri ini. Selain itu, hilirisasi rumput laut juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai alternatif sumber energi terbarukan. Untuk dapat melakukan hilirisasi rumput laut dibutuhkan penurunan biaya produksi budidaya dan pengolahan rumput laut. Melalui pembudidayaan skala besar dan penggunaan teknologi/ mekanisasi. Hilirisasi industri juga dapat mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia guna mewujudkan visi menjadi negara maju.







Festival Negeri 1.000 Ombak Sail Teluk Cendrawasih Sukses digelar di Kabupaten Sarmi

Sarmi, Festival Negeri 1000 Ombak Sail Teluk Cenderawasih sukses digelar di Pantai Wisata Telaga Cemara, Kampung Holmafen, Distrik Sarmi Timur pada 19-23 September 2023. Festival Negeri 1000 ombak merupakan salah satu upaya menumbuhkan perekonomian daerah dengan tujuan menyukseskan puncak acara Sail Teluk Cenderawasih (STC) yang akan dilaksanakan di Biak pada 1-7 November mendatang. Selain menjadi rangkaian dari STC, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Hari Maritim Nasional ke-59 yang jatuh pada 23 September 2023. Festival ini dimeriahkan dengan berbagai pentas seni dan budaya, pameran hasil kerajinan tangan lokal, berbagai macam lomba, hingga pemecahan rekor Muri dalam gelar makan 20.000 buah kelapa.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim (SAM) Kemenko Marves Sugeng Santoso hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi pelaksanaan Festival Negeri 1.000 Ombak yang telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan dukungan Pemerintah Provinsi, Kementerian dan Lembaga, Badan Usaha, dan para Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Papua serta antusias masyarakat untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

"Sarmi memiliki banyak potensi wisata, seperti wisata bahari di Pulau Liki, Pulau Yamna, Pulau Masi-masi, dan lainnya. Kabupaten Sarmi juga memiliki potensi Kelautan dan Perikanan yang begitu besar. Potensi laut yang ada di Sarmi ini tentu harus kita jaga. Disamping itu Sarmi juga memiliki potensi pengembangan produk unggulan daerah melalui produk ekonomi kreatif kerajinan diantaranya tenun terfo, noken, anyaman topi dari rotan, dan produk desain/multi media yang dihasilkan oleh sekolah vokasi (SMK) di Kabupaten Sarmi berupa kaos Festival Negeri 1.000 Ombak dan lainnya. Kegiatan Festival Negeri 1.000 Ombak ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Sarmi, sekolah vokasi dan para pelaku UMKM-ekomomi kreatif serta pariwisata Sarmi," ungkap Staf Ahli Sugeng.



Festival Negeri 1000 Ombak di Sarmi adalah side event dari Sail Teluk Cendrawasih di Wilayah Adat Saireri yang juga merupakan Serambi Merah Putih di Papua dan Kawasan Pasifik jelasnya Lebih lanjut. Staf Ahli Sugeng mengatakan bahwa Sarmi merupakan salah satu kabupaten yang menarik dan unik karena merupakan singkatan dari lima suku besar, yakni Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem dan Isirawa, dan festival ini masuk dalam rangkaian Sail Teluk Cendrawasih dan agenda Literasi Bulan Maritim dan tentunya sejalan dengan semangat Hari Maritim Nasional.

Hari Maritim Nasional (HMN) merupakan salah satu hari penting nasional yang diperingati setiap tahunnya. Peringatan ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan besarnya potensi maritim di tanah air. HMN juga menjadi momentum yang tepat untuk mengoptimalkan seluruh sektor maritim dalam mendukung rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pemerintah Kabupaten Sarmi juga telah melaksanakan program GASING (Gampang Asyik dan Menyenangkan) dibawah binaan Prof. Yohanes Surya, diharapkan agar anak-anak Sarmi dapat lebih cerdas dan pintar dalam mengelola potensi sumber daya yang ada di daerahnya. Pada acara Fetival Negeri 1.000 Ombak ini juga ditampilkan anak-anak Sarmi yang terampil dengan Metode Gasing tersebut yang sangat menarik perhatian.

Selanjutnya, kita semua berharap kepada Bapak Gubernur, Bupati, Walikota, dan seluruh masyarakat: agar pandai dalam mengelola alam pemberian Tuhan. Jangan sampai alam yang ada menjadi rusak karena ulah manusia yang tidak bertanggungjawab. Laut kita adalah bagian dari ekosistem, oleh karena itu mari jaga laut kita dengan segala keindahan dan potensi yang dimilikinya.



Rangkaian Kegiatan Kemenko Marves Menuju Perayaan Puncak Hari Maritim Nasional ke-59

Merupakan tradisi di Indonesia pada setiap tanggal 23 September untuk memperingati Hari Maritim Nasional (HMN) yang yang telah ditetapkan oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1964, karena secara geografis 2/3 wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) turut merayakan Hari Maritim Nasional setiap tahunnya dengan tujuan untuk mengingatkan kembali dan membangkitkan semangat maritim masyarakat Indonesia terutama generasi muda. Di tahun 2023 ini, Kemenko Marves mengusung tema "Pembangunan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045."

Mengingat akan kekayaan sumber daya laut yang dimiliki negeri ini, penting adanya edukasi dan diskusi terkait potensi serta pengelolaan sumber daya maritim. Akan hal itu, Kemenko Marves mengagendakan serangkaian kegiatan menuju perayaan puncak Hari Maritim Nasional ke-59 yang akan digelar di Kupang, Nusa Tenggara

Timur. Rangkaian agenda tersebut meliputi kegiatan sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) yang dilaksanakan di Kepulauan Riau pada Sabtu (23/09/2023) dan dilanjutkan dengan kegiatan Seminar Nasional Kemaritiman yang berlangsung di Kupang, NTT pada Jumat (30/09/2023).

Pada kegiatan sosialisasi GEMARIKAN, Kemenko Marves bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kepulauan Riau. Sosialisasi ini juga dilengkapi dengan sesi Talkshow menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo dan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Andreas Dipi Patria.

"Berdasarkan UUD 1945 pasal 25A yang menyatakan







bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola sumber daya laut seperti terumbu karang, ekosistem mangrove, rumput laut, dan sumber daya perikanan yang terkandung sebagai kekayaan laut Provinsi Kepulauan Riau," ucap Karo Andreas.

Tak hanya sesi talkshow, berbagai acara juga turut memeriahkan peringatan HMN ke-59 di Kepulauan Riau seperti pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisasi terkait pencegahan kanker, aksi donor darah, serta lomba memasak berbahan baku ikan yang diadakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya melestarikan potensi sumber daya laut Indonesia.

Melanjutkan rangkaian kegiatan perayaan Puncak Hari Maritim Nasional ke-59 di Kepulauan Riau, Kemenko Marves melanjutkan giat di Kupang, NTT yaitu, menggelar Seminar Nasional Kemaritiman yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang. Meng-

hadiri berbagai ahli dalam bidang kemaritiman dalam dengan format diskusi panel.

Seminar Nasional Kemaritiman sesi Diskusi Panel pertama diisi oleh 3 (tiga) pembicara antara lain, Prof. Dr. Marsetio, Dr. Eng Lukijanto, dan Amalia Adininggar dengan topik mulai dari geopolitik, visi kemaritiman, hingga konektivitas. Pada diskusi panel ini, Prof. Dr. Marsetio menyampaikan bahwa posisi geo-poltik Indonesia sebagai negara middle power memiliki daya lentur yang baik dalam menghadapi permasalahan domestik, kawasan, maupun global di tengah persaingan Amerika dan China yang kompleks.

Terkait program Indonesia Emas 2045, Bappenas telah menetapkan 5 (lima) yang mengedepankan prinsip-prinsip. Visi tersebut adalah pendapatan perkapita yang setara dengan negara maju, kemiskinan menuju 0% dan berkurangnya ketimpangan ekonomi, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, serta penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Terkait dengan isu konektivitas di Nusa Tenggara, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Lukijanto, menerangkan bahwa pembagian peran antarmoda Nusa Tenggara perlu dioptimalkan karena Kepulauan Nusa Tenggara memiliki peran strategis bagi Indonesia, sehingga pengembangan sistem transportasinya perlu dipandang secara luas baik sebagai pintu gerbang pariwisata nasional, maupun daerah yang rawan bencana.

Seminar Nasional Kemaritiman sesi kedua membahas Inovasi Pembiayaan Pembangunan Ekonomi Biru Melalui Upaya Proteksi dan Produksi menuju Indonesia Emas 2045 dan Budaya Maritim sebagai Basis Ketahanan Masyarakat. Kegiatan Seminar Nasional Kemaritiman sesi kedua ini dipandu oleh Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves, Andreas Dipi Patria.

Membuka sesi kedua, Karo Andreas mengatakan bahwa NTT memiliki Taman Nasional Perairan (TNP) terluas, yaitu pada wilayah perairan Laut Sawu. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara produksi dan proteksi.

"Dari Konservasi Indonesia, yaitu Rian Prasetia akan menjelaskan tentang strategi menyeimbangkan hal tersebut dan bagaimana upaya-upaya pengembangan ekonomi dan pembiayaannya dalam rangka mengembangkan kawasan strategis, bukan hanya melalui pertumbuhan tetapi juga melalui proteksi. Selain itu, dari Kondradius Blajan juga akan menyampaikan tentang faktor budaya untuk menjaga keberlanjutan yang akan menjadi hal yang strategis," ujarnya.

Senior Manager Blue Halo S, Konservasi Indonesia, Rian Prasetia dalam paparannya mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi ekosistem pesisir dan lautnya. Lebih lanjut, Rian menjelaskan bahwa saat ini kontribusi ekonomi biru terhadap PDB Indonesia rata-rata 3,6%, dan diharapkan hingga tahun 2045 kontribusi sektor ekonomi biru sebesar 12,45%.





"Terdapat 8 sektor prioritas ekonomi biru yang strategis, antara lain pengelolaan limbah, konservasi ekosistem dan upaya restorasi, perikanan dan budidaya berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan bencana dan pengurangan risiko, bioteknologi kelautan, ekowisata, teknologi kelautan, dan semua ini menjadi target-target yang dapat dikembangkan ke depan," tambahnya.

Salah satu program di Konservasi Indonesia adalah Blue Halo S yang merupakan salah satu inovasi pembiayaan sektor ekonomi biru. Blue Halo S merupakan inovasi bersama dari Konservasi Indonesia, Kemenko Marves, KKP, dan mitra Konservasi Indonesia. Blue Halo S mendukung 5 agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait Pembangunan Ekonomi Biru. Pilot project Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang akan dilaksanakan di wilayah pesisir barat Sumatra.

Pakar Sosio Antropologi Kondradius Blajan menjelaskan mengenai tantangan penerapan budaya maritim sebagai basis ketahanan masyarakat yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait, guna meningkatkan ilmu dan pengetahuan di bidang kemaritiman.

"Budaya maritim dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan laut," ungkap Blajan.

Blajan memberikan lima rekomendasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya potensi laut, mempromosikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan, membangun infrastruktur maritim, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait kegiatan maritim, serta mendorong kegiatan ekonomi berbasis maritim.

Kemenko Marves melanjutkan agenda terakhir dalam perayaan Hari Maritim Nasional ke-59 yaitu, Puncak Hari Maritim Nasional 2023 pada Oktober di Kupang, NTT.

NOUVELLE HOLLANDE









Film Petualangan Sherina 2 bercerita tentang Sherina (Sherina) dewasa yang bertemu dengan sahabat masa kecilnya, yaitu Sadam (Derby Romero). Berawal dari Sherina yang berprofesi sebagai wartawan dipindahtugaskan dari Swiss ke Kalimantan untuk melakukan peliputan eksklusif mengenai lingkungan hidup di tempat tinggalnya dulu.

Setelah sampai di lokasi peliputannya, tak disangka Sherina bertemu dengan Sadam yang saat itu menjadi program manager di sebuah LSM konservasi di hutan Kalimantan. Diceritakan, Sadam juga akan membantu Sherina dalam peliputannya.

Bertemu dengan teman masa kecil, membuat mereka saling melepas rindu. Namun, persahabatan mereka mendadak diuji ketika sekelompok orang mencuri anak orang utan bernama Sayu yang dilepasliarkan.

Karakter-karakter dalam film sekuelnya ini diciptakan mirip seperti film pendahulunya. Pertama, tentu ada Sherina dan Sadam yang tetap menjadi pusat cerita.

Kemudian, ada cecunguk penculik yang dulu dipimpin Butet Kartaradjasa, yang kini komplotan pencuri dipimpin oleh Randy Danistha dan Kelly Tandiono. Juga ada bos besar di balik misi penculikan/pencurian itu, dulu diperankan Djaduk Ferianto-Henidar Amroe, yang kini dimainkan oleh Isyana-Sarasvati-Chandra Satria.

Begitu pula dengan musik yang menemani sepanjang film. Apresiasi kepada Sherina Munaf yang berhasil dan mampu meneruskan jejak mendiang Elfa Secioria yang merupakan guru vokalnya dulu.

Sherina berhasil hanya mengambil nada dan atau lirik yang paling ikonis dari sebuah lagu sehingga langsung bisa memantik nostalgia para penonton. Karena, ketika sebuah lagu dimulai dengan nada tertentu, saya langsung tahu lagu apa yang akan dimainkan meskipun liriknya disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Ketujuh lagu tersebut sebagian besar bukan lagu baru karena *mirroring* dengan lagu-lagu film pertama. Misalnya lagu Menikmati Hariku merupakan penerus lagu Menikmati Hari. Hadiah Istimewa merupakan lagu untuk para *villain* dengan nuansa yang sama dengan lagu Kertarajasa.

Ada satu lagu yang benar-benar baru, berjudul Sayu. Lagu yang benar-benar menenangkan, terutama karena khusus dinyanyikan oleh Sherina dan Derby Romero ketika berada di adegan melepas orang utan ke alam bebas.

Kualitas akting semua pemeran malah kerap tertutup adegan-adegan *musical*. Termasuk dua pemeran utamanya, Sherina dan Derby yang hampir hilang ditelan musikal film ini sendiri, kalau saja tanpa mengosongkan bagian Tengah berikut pecah konflik antara Sadam dan Sherina. Pun demikian dengan kedua sosok jahat. Ratih (Isyana) dan Syailendra (Chandra) yang sekadar tampak orang kaya biasa yang awam dengan kejahatan itu sendiri. Justru hanya Pinkan (Kelly) satu-satunya yang berhasil menunjukkan aura jahatnya, walau posisinya sebagai pesuruh.



14 AGUSTUS 2023

